

## **DAMPAK EKSPANSI FISKAL TERHADAP INFLASI: STUDI EMPIRIS DENGAN PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL**

Jaka Sriyana

### **Abstract**

*In fact, for the first of long term development Indonesia has achieved successfully the high rate of economic growth. But, in this period a high rate of inflation occurred. Since 1969 government has applied a deficit fiscal, in which total expenditure is over domestic income. In fact, the value of deficit tends to be higher each year. A high of deficit fiscal was indicated by strongly increase in both routine expenditure and public investment. Uncontrolled deficit fiscal policy and increasing of government expenditure has negative effects in supporting inflation.*

*This paper analyzes the effect of government expenditure to inflation in Indonesia. The Error Correction Model (ECM) is used to find the short and long run perspective. The analysis is focused on the data of the period of 1969-1998. The result shows that fiscal expansion indicated by increasing in government expenditure statistically significant cause inflation.*

**Keyword:** *fiscal expansion, inflation, error correction model*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pola kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam perkembangan selama tiga dasa warsa pembangunan ekonomi di Indonesia telah menunjukkan hasil yang cukup berarti, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi. Indikator-indikator ekonomi makro telah mengalami perubahan yang cukup besar dalam kurun waktu tersebut. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Tentu saja semua ini diperoleh dengan suatu bentuk managemen tertentu yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Namun demikian keberhasilan tersebut bukannya tanpa masalah. Inflasi yang relatif tinggi mendekati 10 %, dan merosotnya nilai tukar merupakan indikator yang mencerminkan

kelemahan managemen makroekonomi selama itu. Data pada tabel 1 menunjukkan beberapa indikator makroekonomi pada beberapa tahun. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mempunyai fungsi mengatur jumlah dan alokasi uang beredar serta mempengaruhi tingkat bunga untuk mencapai sasaran ekonomi makro. Sasarannya yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, keseimbangan neraca pembayaran, dan kestabilan harga.

Sejak Orde Baru perkembangan perbankan mengalami perkembangan pesat, khususnya setelah adanya kebijakan moneter yang dijalankan semenjak tahun 1983 antara lain melalui paket kebijakan satu Juli 1983 yang bertujuan memobilisasi dana melalui sektor perbankan yaitu berupa penghapusan pagu aktiva perbankan serta pemberian kebebasan bank-bank pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan perkreditan termasuk tingkat suku bunganya

**Tabel 1.**  
**Beberapa Indikator Makroekonomi Indonesia**

Keterangan	Tahun	Besaran
Laju GDP (%)	1980 – 1990	6,3
	1990 – 1997	7,6
Inflasi (%)	1985 – 1997	8,8
	1985	19.383
Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)	1995	79.215
	1980 – 1990	2,3
Defisit Fiskal (%GNP)	1990 – 1997	0,6
	1980	3,3
Deficit Current Account (% GNP)	1995	7,0

Sumber: Dirangkum dari beberapa sumber.

Perilaku perubahan inflasi sangat erat kaitannya dengan perubahan jumlah uang beredar dan ekspansi fiskal. Mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah uang beredar terlihat adanya pergeseran dari sektor pemerintah ke sektor kegiatan perusahaan dan sektor luar negeri. Hal ini berarti bahwa pemerintah telah dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran dari sumber penerimaan yang *non inflation*. Selama Pelita I, sektor pemerintah pada umumnya memberikan pengaruh kontradiktif, sedangkan sebaliknya sektor kegiatan perusahaan telah menyebabkan pengaruh ekspansif terhadap jumlah uang beredar. Sektor luar negeri juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap jumlah uang beredar, terutama pada tiga tahun terakhir Pelita I. Hal ini menunjukkan bahwa neraca pembayaran mengalami surplus yang sekaligus merupakan penambahan cadangan devisa.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah uang beredar telah meningkat dengan rata-rata 13,71% pertahun, sebagai perbandingan Pelita III rata-rata 24,71% pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan selama Pelita IV pada gilirannya dapat menciptakan keadaan yang mantap sebagaimana tercermin pada stabilitas harga dan terpeliharanya keseimbangan

jumlah uang beredar meningkat menjadi 20,81% pertahun antara tahun 1994–1996 jumlah uang beredar meningkat rata-rata sebesar 20,3% pertahun, masing-masing sebesar 23,28% untuk tahun 1994, 16,09% untuk tahun 1995, 21,60% tahun 1996, 22,24% tahun 1997, 29,17% tahun 1998.

#### **PERKEMBANGAN PENGELOUARAN PEMERINTAH**

Pengeluaran pemerintah pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai roda pemerintahan sehari-hari: meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, angsuran dan bunga cicilan utang pemerintah serta sejumlah operasi pengeluaran lainnya. Selama Pelita I pengeluaran pemerintah berjumlah Rp 3.2381,1 miliar sekitar 62% diantaranya berupa pengeluaran rutin pemerintah mengalami peningkatan yang cukup pesat, masing-masing naik sebesar Rp. 4.565 dan 269%. Meskipun mengalami kenaikan tertinggi proporsi pengeluaran pemerintah mengalami penurunan dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan sehingga mempengaruhi pengeluaran untuk belanja pegawai maupun untuk belanja barang.

Turunnya penerimaan rutin dibandingkan penerimaan pembangunan hal ini dise-

babkan oleh hasil dari *boom* minyak. Selama Pelita II dan III telah banyak digunakan untuk membiayai pembangunan. Akibatnya, realisasi pengeluaran pemerintah meningkat dua kali lipat. Selama itu pengeluaran pemerintah tumbuh sangat-progresif. Faktor inilah yang menjelaskan mengapa Pelita II dan III proporsi pengeluaran pemerintah mengalami penurunan. Selama Pelita IV, V dan sampai tahun 1998 proporsi pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dibanding pengeluaran pembangunan.

### TEORI, MODEL DAN ANALISIS

Inflasi sebagai suatu fenomena makro ekonomi sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh variabel-variabel ekonomi belaka, tetapi juga variabel sosial ekonomi politik. Hal ini karena adanya *the invisible hand* yang sifatnya sangat mudah berubah. Usaha untuk memahami dan menyelidiki tingkat inflasi di suatu negara diperlukan pemahaman tentang aspek-aspek mana yang dalam kenyataannya mempengaruhi tingkat inflasi, sehingga kita bisa memilih salah satu atau kombinasi teori yang ada.

Dari banyak teori yang menjelaskan tentang inflasi, teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi yang dipelopori oleh Irving. Teori kuantitas menyorti aspek moneter sebagai faktor yang mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya inflasi. Sebagai basis teorinya kelompok kuantitas bersandar pada hukum kuantitas uang dari Irving Fisher yang dapat dituliskan sebagai berikut:

$$M \cdot V = P \cdot T,$$

di mana  $M$  = Money,  $V$  = *Velocity of Money*,  $P$  = Price,  $T$  = volume transaksi. Rumus tersebut digunakan untuk menerangkan tentang perilaku kenaikan harga ( $P/Price$ ). Berdasarkan rumus kuantitas apabila penawaran uang  $M$  (*money*) bertambah  $n$  kali maka tingkat harga  $P$  juga akan naik  $n$  kali. Teori kuantitas berasumsi bahwa  $V$  (*Velocity of money*) dan  $T$  (*Trade*) dalam konstan.

Teori tentang inflasi lainnya berasal dari John Maynard Keynes (Beodiono, 1994:147). Teori ini menyatakan bahwa terjadinya inflasi adalah disebabkan oleh permintaan agregat, sedangkan permintaan agregat ini tidak hanya karena ekspansi Bank Sentral, namun dapat pula disebabkan oleh pengeluaran investasi baik oleh pemerintah, maupun oleh swasta dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang melebihi penerimaan (defisit anggaran belanja negara) dalam kondisi ekonomi *full employment*. Secara garis besarnya Keynes menyebutkan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Teori lain tentang inflasi adalah teori strukturalis, yang menjelaskan fenomena inflasi dalam jangka panjang (Boediono, 1985,173). Teori ini berkembang dari pengalaman negara-negara Amerika Latin. Menurut kelompok strukturalis inflasi di negara-negara berkembang disebabkan oleh kelemahan dalam struktur perekonomiannya. Kelemahan struktur ini karena diakibatkan oleh adanya ketegaran (*inflationary*) dari perekonomian negara-negara sedang berkembang.

Selain ketiga teori yang telah disebutkan di atas ada beberapa teori lagi yang membahas tentang inflasi salah satunya adalah teori Paritas Daya Beli. (lihat Setyowati, 1993) Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Gustav Casell tahun 1922 (Kelana,1996; 273; Khalwat, 2000; 237) yang mengandung dua pengertian, yaitu pengertian absolut dan pengertian relatif. Pengertian absolut mengatakan bahwa kurs keseimbangan diantara mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri merupakan nisbah antara harga absolut dalam negeri dan harga absolut luar negeri. Sedangkan pengertian relatif menyatakan, bahwa prosentase perubahan kurs keseimbangan di antara mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri merupakan nisbah antara prosentase perubahan harga dalam negeri dan prosentase perubahan harga luar negeri, sehingga prosentase perubahan kurs tersebut mencerminkan perbedaan tingkat

inflasi diantara dua negara. Beberapa hal yang perlu ditekankan dari teori Paritas Daya Beli adalah. *pertama* masalah dasar dari Paritas Daya Beli, yakni proporsionalitas tingkat harga dan nilai tukar hanya terjadi jika penyebab guncangan yang mengubah tingkat harga dan nilai tukar merupakan suatu guncangan moneter. *Kedua*, teori Paritas Daya Beli tersebut tidak dapat kerja seketika, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga dapat dikatakan bahwa teori tersebut menunjukkan hubungan keseimbangan jangka panjang antara nilai tukar dengan tingkat harga. Berdasarkan paparan beberapa teori di muka, maka dalam tulisan ini dikemukakan model inflasi yang akan dianalisis adalah :

di mana.  $Mt$  = jumlah uang beredar,  $Gt$  = pengeluaran pemerintah dan  $Kt$  = nilai kurs dollar US terhadap rupiah. Untuk mencapai tujuan analisis tentang dampak ekspansi pengeluaran pemerintah terhadap inflasi, maka dalam analisis ini digunakan pendekatan model koreksi kesalahan (ECM), dimana sebelumnya perlu dilakukan uji stasionaritas terhadap data yang dianalisis. Persamaan yang digunakan untuk estimasi dalam bentuk ECM adalah:

$$DP_t = b_0 + b_1 DM_t + b_2 DG_t + b_3 DK_t + b_4 BM_t + b_5 BG_t + b_6 BK_t + b_7 ECT_t + U_t \dots \dots \dots (2)$$

dimana :

DPt = Perbedaan pertama terhadap inflasi (P)

DM<sub>t</sub> = Perbedaan pertama jumlah uang beredar (M<sub>t</sub>)

DG<sub>t</sub> = Perbedaan pertama pengeluaran pemerintah (G)

DK<sub>1</sub> = Perbedaan pertama nilai kurs rupiah terhadap dollar (K<sub>1</sub>)

BM. = Kelambaban jumlah uang beredar (M)

BGt = Kelambaban pengeluaran pemerintah (G)

**BK<sub>t</sub>** = Kelambanan nilai kurs rupiah terhadap dollar (K)

$$ECT_t = Error\ Correction\ Term ( BM_t + BG_t + BK_t - BP_t )$$

U<sub>i</sub> = Residual

t = Periode waktu

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data yang digunakan untuk estimasi dalam penelitian ini adalah data antara tahun 1973 sampai dengan tahun 1998. Adapun variabel yang dianalisis dapat dijelaskan pada tabel 3.

## Hasil Uji Stasionaritas

4) Seperti dijelaskan dimuka, bahwa sebelum melakukan analisis dengan ECM, maka perlu adanya uji stasionaritas terhadap data, agar dapat dipastikan datanya sudah stationer. Untuk itu dilakukan uji akar-akar unit dan uji derajat integrasi. Apabila uji akar-akar unit data belum stationer maka dilanjutkan dengan uji derajat integrasi, sehingga diperoleh data/variabel yang stationer. (tabel

### **Uji Akar-akar Unit**

Pada dasarnya uji akar-akar unit adalah untuk mengamati apakah koefisien tertentu dari model yang ditaksir mempunyai nilai satu atau tidak. Untuk menguji perilaku data, penelitian ini memakai uji Dickey dan Fuller (Uji DF), dan Augmented Dickey-Fuller (ADF). Dalam membandingkan nilai DF dan ADF hitung dengan DF dan ADF tabel digunakan nilai kritis yang telah dikembangkan oleh Mac-Kinnon .

Adapun hasil dari uji akar-akar unit yang dilakukan dengan OLS adalah pada tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut estimasinya menunjukkan bahwa variabel yang diamati nilai absolut DF dan ADF hitung tidak stationer baik pada derajat keyakinan 1%, 5%, dan 10%. Oleh karena itu perlu dilakukan uji lebih lanjut yaitu derajat integrasi untuk mengetahui pada derajat berapa data akan stationer (tabel 5).

### Uji Derajat Integrasi

Uji derajat integrasi merupakan kelanjutan dari uji akar-akar unit dan hanya diperlukan apabila seluruh datanya belum stationer pada derajat nol atau 1 (0). Uji derajat integrasi ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat berapa data yang diamati akan stationer. Definisi secara formal mengenai integrasi suatu data adalah data runtun waktu X dikatakan berintegrasi pada derajat atau ditulis d (i), jika data itu perlu dideferensiasi sebanyak d kali untuk dapat menjadi data yang stationer atau 1(0). Adapun hasil dari derajat integrasi adalah terdapat pada tabel 5 di bawah ini.

Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel 4 di atas diketahui bahwa semua nilai DF dan ADF hitung variabel pengamatan lebih besar dari nilai DF dan ADF tabel pada derajat 1 % dan 5 %. Berarti semua variabel pengamatan sudah stationer pada derajat pertama. Menurut pandangan Wickens dan Breush (1988) bahwa stationer tidaknya suatu data dapat menjadi timbulnya persoalan dalam regresi. Untuk itu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi hasil estimasi regresi adalah dengan menggunakan model dinamis misalnya pendekatan model koreksi kesalahan (Wickens dan Breush, 1988; Sugiri, 2000).

### Hasil Estimasi *Error Correction Model*

Hasil estimasi, pengujian hasil estimasi, hubungan antar variabel terikat dengan variabel penjelas secara statistik dipaparkan pada bagian berikut. Prosedur yang telah dilakukan meliputi pengujian variabel penjelas secara individu, pengujian secara bersama-sama dan test penyimpangan terhadap asumsi klasik (tabel 6).

Hasil estimasi *error correction model* (ECM) menunjukkan bahwa *error correction term* (ECT) berarti sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t statistik koefisien regresi ECT sebesar 3, 2779 . Hal ini menandakan bahwa model ECM yang digunakan

untuk menganalisa inflasi tidak diragukan validitasnya. Dari hasil estimasi pada tabel *Error Correction Model* di atas dapat di peroleh persamaan jangka panjang, di mana koefisien jangka panjang ini dapat dihitung berdasarkan koefisien *backwardnya*:

$$P_t = -3,5408 + 0,2333M_t + 0,3217G_t + 0,2035K_t$$

Variabel uang beredar dalam penelitian ini digunakan  $M_t$  yang terdiri dari jumlah uang kartal ditambah uang giral. Koefisien regresinya dalam jangka pendek sebesar 0,0249 dengan tingkat signifikansi sebesar 10% yang berarti, bahwa peningkatan perubahan  $M_t$  sebesar 1 miliar rupiah akan berpengaruh terhadap peningkatan tingkat inflasi sebesar 2,49%. Koefisien regresi dalam jangka panjang sebesar 0,2333 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% yang berarti bahwa peningkatan perubahan  $M_t$  sebesar 1 miliar rupiah akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi sebesar 23,33%. Hipotesis bahwa jumlah uang beredar sebagai salah satu variabel permintaan agregat dan sebagai kebijakan ekonomi makro pemerintah telah teruji secara statistik signifikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran untuk belanja barang dan jasa, subsidi daerah otonom, belanja pegawai dan lain-lain. Variabel pengeluaran pemerintah (G) ini mempunyai koefisien regresi dalam jangka pendek sebesar 0, 1634 dengan tingkat signifikansi sebesar 10% yang berarti bahwa peningkatan perubahan pengeluaran pemerintah (G) sebesar 1 miliar rupiah akan berpengaruh terhadap kenaikan tingkat inflasi sebesar 16,34%. Koefisien regresi dalam jangka panjang sebesar 0,3217 dengan tingkat signifikansi 5% yang berarti dengan peningkatan G sebesar 1 miliar rupiah, akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi sebesar 32,17%. Hipotesis bahwa ekspansi pengeleuaran pemerintah (G) sebagai permintaan agregat yang akan berdampak pada kenaikan

inflasi telah teruji dan terbukti secara statistik signifikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Adapun variabel kurs (Kt) ini mempunyai koefisien regresi dalam jangka pendek sebesar 0, 0408 namun tidak signifikan. Koefisien regresi dalam jangka panjang sebesar 0,2035 dengan tingkat signifikansi 5% yang berarti adanya depresiasi rupiah akan menimbulkan peningkatan inflasi. Hipotesis bahwa depresiasi akan berdampak pada kenaikan inflasi telah teruji dan terbukti secara statistik signifikan walaupun hanya dalam jangka panjang.

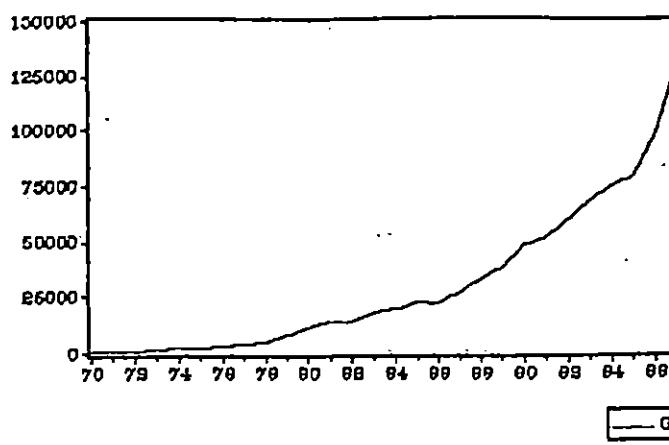
## SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah selama ini telah membawa dampak pada peningkatan laju inflasi. Oleh karena itu perlu dilakukan cara-cara untuk melakukan *fiscal deepening* agar ekspansi fiskal tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga. Pengendalian pengeluaran pemerintah sebagai instrumen

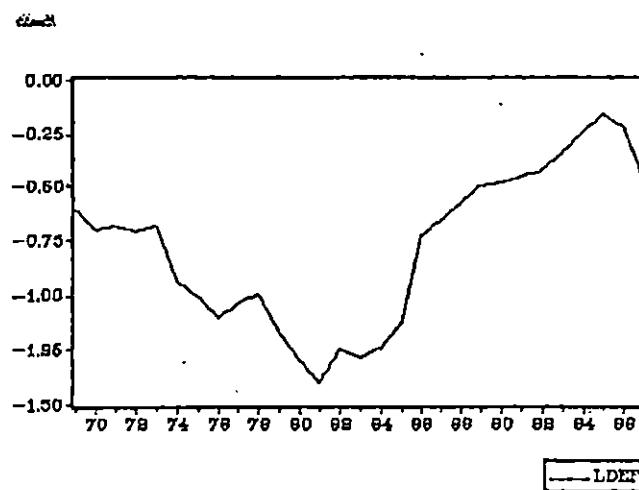
kebijakan fiskal untuk mengendalikan laju inflasi antara lain dilakukan dengan efisiensi alokasi anggaran dan memberikan bobot yang lebih besar pada pengeluaran pembangunan. Artinya belanja barang yang bersifat konsumtif perlu ditinjau kembali. Pengelolaan pengeluaran pemerintah ini juga harus diimbangi oleh kebijakan moneter yang kontradiktif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar serta deregulasi di sektor riil, sehingga perekonomian menjadi lebih efisien.

Agar pengeluaran pemerintah efektif dan efisien maka fungsi pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus berjalan dengan baik. Indonesia bisa menggunakan konsep *planning, programming and budgeting system* (PPBS) untuk mengelola pengeluaran pemerintahnya. Pemberantasan korupsi dan kolusi merupakan masalah utama di lingkungan birokrat kita untuk mengurangi kebocoran anggaran, sehingga bisa lebih menghemat anggaran belanja negara. Hal ini perlu ditekankan karena akan menyebabkan *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi).

*Gambar 1.*  
Pola Pengeluaran Pemerintah, 1969 –1998



**Gambar 2:**  
Perubahan Defisit Anggaran, 1969-1997



**Tabel 2**  
Laju Inflasi , Jumlah Uang Beredar, Pengeluaran Pemerintah,  
dan Nilai Tukar Rupiah, 1973 – 1998

TAHUN	INFLASI (%)	JUB( M1) Miliar Rupiah	Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah )	Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar
1973	27,30	669,4	699,7	420
1974	33,32	937,2	985,7	423
1975	19,69	1250,1	1239,3	421
1976	11,2	1603	1605,1	421
1977	19,69	2006	2079,8	421
1978	6,62	2488	2672,7	643
1979	21,77	3385	3999,2	632
1980	15,97	4995	5549,5	643
1981	7,09	6486	6943	641
1982	9,69	7121	6967,3	692
1983	11,46	7569	10215,2	994
1984	8,76	8281	9405,9	1076
1985	4,31	10104	12006,4	1131

1986	8,83	11677	13716,7	1655
1987	8,90	12685	17340,6	1652
1988	5,47	14392	20934,9	1729
1989	5,97	20114	24335,2	1805
1990	9,53	23818	29121,1	1901
1991	9,52	26312	29053,0	1992
1992	4,94	28779	33065	2062
1993	9,77	36805	40289,9	2110
1994	9,24	45374	44069,0	2200
1995	8,64	52677	52540,9	2308
1996	6,47	64089	56113,7	2383
1997	11,05	78343	62158,8	4650
1998	75,0	101197	171205,1	8023

Sumber : BPS berbagai tahun diolah

**Tabel 3**  
**Diskripsi Data yang Digunakan**

LAMBANG	VARIABEL	INDIKATOR YANG DIGUNAKAN
P	Harga Umum	Angka Inflasi antara tahun 1972 sampai 1998
M	Jumlah Uang Beredar	M1 atau Narrow Money ( Uang Kartai dan Uang Girai )
G	Pengeluaran Pemerintah	Pengeluaran Rutin Domestik ( Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pegawai Luar Negeri, Pengeluaran Belanja Barang Luar Negeri, Pembayaran untuk Bunga dan Cicilan Hutang )
K	Kurs Valuta Asing	Nilai Kurs Tengah Dollar USA terhadap Rupiah

**Tabel 4**  
**Uji Akar – Akar Unit**

Variabel	Nilai DF	Nilai ADF
P <sub>t</sub>	- 1, 3780	- 0, 0546
M <sub>t</sub>	0, 0736	1, 4061
G <sub>t</sub>	2, 3154	2, 5810
K <sub>t</sub>	1, 6806	0, 5558

Keterangan : a. Signifikan pada Nilai kritis Mc Kinnon 1%  
 b. Signifikan pada Nilai kritis Mc Kinnon 5%  
 c. Signifikan pada Nilai kritis Mc Kinnon 10%

**Tabel 5**  
**Uji Derajat Integrasi**

Variabel	Nilai DF	Nilai ADF
DP <sub>t</sub>	- 3, 9470 <sup>a</sup>	- 4, 0716 <sup>a</sup>
DM <sub>t</sub>	- 3, 3384 <sup>b</sup>	- 3, 6503 <sup>b</sup>
DG <sub>t</sub>	- 3, 1902 <sup>b</sup>	- 3, 4928 <sup>b</sup>
DK <sub>t</sub>	- 4, 2867 <sup>a</sup>	- 4, 7355 <sup>a</sup>

Sumber : lampiran uji derajat integrasi

Keterangan : a. Signifikan pada Nilai kritis Mc Kinnon 1%  
 b. Signifikan pada Nilai kritis Mc Kinnon 5%  
 c. Signifikan pada Nilai kritis Mc Kinnon 10%

**Tabel 6**  
**Hasil Estimasi ECM**

Variabel Penjelas	Koefisien	Standar Error	T Hitung
C	-2,33666482	2,6910	- 0,8682
DM <sub>t</sub>	0,0249043	0,0123	2,0192*
DG <sub>t</sub>	0,1634727	0,0916	1,7837*
DK <sub>t</sub>	0,0408366	0,0440	0,9279
BMT	-0,5059560	0,1998	- 2,5319**
BGT	-0,4476895	0,1698	- 2,6363**
BKI	-0,5256885	0,2429	- 2,1639**
ECT <sub>t</sub>	0,6599027	0,2013	3,2779**

Dimana :

\* = signifikan pada  $\alpha = 10\%$       \*\* = signifikan pada  $\alpha = 5\%$

R<sup>2</sup> = 0,9228      R<sup>2</sup> Adj = 0,8928      SEE = 0,0405

F = 30,75      DW = 1,97

DP<sub>t</sub> = Perbedaan pertama terhadap Inflasi

DM<sub>t</sub> = Perbedaan pertama jumlah uang beredar ( M1 )

DG<sub>t</sub> = Perbedaan pertama pengeluaran pemerintah ( G )

- $DK_t$  = Perbedaan pertama nilai kurs rupiah terhadap dollar ( K )  
 $BM_t$  = Kelambanan kebelakang jumlah uang beredar (M1 )  
 $BG_t$  = Kelambanan kebelakang pengeluaran pemerintah ( G )  
 $BK_t$  = Kelambanan nilai kurs rupiah terhadap dollar ( K )

## DAFTAR PUSTAKA

- Anang, Suhendar, (2000), Pengujian dan Pemilihan Model Inflasi dengan Non Nested Test, vol 15, No, 2, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Yogyakarta.
- Anton, H. Gunawan, (1991), *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*, Jakarta Gramedia.
- Barry, F., dan M.B. Devereux, (1995), "The Expansionary Fiscal Contraction Hypothesis: A Neo – Keynesian Analysis", *Oxford Economic Papers*, 47, 249-264.
- Beetsmaa, R.M.W.J. dan F. Van der Ploeg, (1996), "Does Inequility Cause Inflation ?: The Political Economy of Inflation, Taxation and Government Debt", *Public Choice*, 87, 143 –162.
- Bernheim, B.D., (1989), "A Neoclassical Perspective on Budget Deficit", *Journal Of Economic Perspectives*, Vol. 3, No. 2, 55 – 72.
- Chao, C.C., dan Edden S.H. Yu, (1993), "Can Fiscal Spending Be Contractionary in The Neoclassical Economy?", *Economica*, 60, 347 – 356.
- Dallen, Hendick P.V. dan Otto H Swank, (1996), "Government Spending Cycles: Ideological or Opportunistic ?", *Public Choice* No. 89, 183 – 200.
- Eisner, R., (1989), "Budget Deficit: Rethoric and Reality" *Journal Of Economic Perspectives*, Vol. 3, No.2 , 73 – 93.
- Gujarati, D.N., (1995), *Basic Econometrics*, McGraw Hill, Co.
- Hill, Hal. (1996), *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966*, Yogyakarta, PAU-UGM Tiara Wacana.
- Hondroyannis, G dan Evangelia P, (1996)."An Examination of The Causal Relationship Between Government Spending and Revenue: A Cointegration and ECM Analysis", *Public Choice* No. 89, 363 – 374.
- Hyman, David.N, (1996), *Public Finance: A Contemporary Applications of Theory to Policies*, 5<sup>th</sup> ed, The Dryden Press.
- Insukindro, (1993), *Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, BPFE.
- Insukindro, (1999), "Pemilihan Model Ekonomi Empirik dengan Pendekatan Koreksi Kesalahan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 14, No.1., 1 – 8.
- Jayaraman, T.K, (1993), "Fiscal deficits and Current Account Imbalances of The South Pacific Countries", *Occasional Paper*, ADB, Dec. 1993,
- Petrovic, P., (1995), "Quasi Fiscal Deficit and Money Demand in Yugoslavia's high Inflation: Some Econometric Evidence", *Journal of Comparative Economics* 20, 32-48.
- Tajul Khalwaty, ( 2000), *Inflasi dan Solusinya*, Jakarta, Gramedia.
- Tambunan, ( 1995 ), *Sumber Inflasi dan Kebijakan Kontradiktif di Indonesia*, Jakarta.
- Tien Setyowati, ( 1993 ), "Penyimpangan Terhadap Doktrin Paritas Daya Beli", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol September 1993, hal 87 – 90.